



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/02/2025
Reviewed : 19/03/2025
Accepted : 21/03/2025
Published : 28/03/2025

Sobri Sabana¹
 Siti Masni²
 Siti Khadijah³
 Dian Sartika⁴
 Rahmi Assihfa⁵
 Flores tanjung⁶

PERAN GURU DALAM MENYESUAIKAN METODE PEMBELAJARAN UNTUK SISWA DENGAN GAYA BELAJAR YANG BERBEDA BEDA

Abstrak

Invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tahun 1975 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan Timor Leste. Peristiwa ini tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Artikel ini mengkaji latar belakang, jalannya invasi, reaksi internasional, serta dampaknya terhadap kedua negara. Invasi dimulai setelah deklarasi kemerdekaan Timor Timur oleh FRETILIN pada November 1975, yang disikapi Indonesia sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Indonesia meluncurkan invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975, yang berujung pada aneksasi Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada 1976. Meskipun mendapat kecaman internasional, Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara besar dalam konteks Perang Dingin. Perlawanan rakyat Timor Leste berlangsung selama dua dekade hingga akhirnya Timor Leste meraih kemerdekaannya pada 20 Mei 2002, setelah referendum yang diadakan pada 1999. Artikel ini juga mengutip berbagai sumber dari buku dan jurnal akademik untuk menggambarkan dampak sosial, politik, dan kemanusiaan yang dihasilkan dari invasi ini.

Kata Kunci: Invasi Indonesia, Timor Timur, FRETILIN, Operasi Seroja, Anexasi, Hak Asasi Manusia, Referendum, Kemerdekaan Timor Leste, Pembantaian Santa Cruz, Konflik Indonesia-Timor Leste, Hubungan Internasional, Perang Dingin.

Abstract

The Indonesian invasion of East Timor which began in 1975 was one of the important events in the history of Indonesia and Timor Leste. This incident not only involved political aspects, but also very serious human rights violations. This article examines the background, course of the invasion, international reaction, and its impact on both countries. The invasion began after FRETILIN's declaration of East Timor's independence in November 1975, which Indonesia responded to as a threat to national stability. Indonesia launched a large-scale invasion on December 7 1975, which resulted in the annexation of East Timor as its 27th province in 1976. Despite international criticism, Indonesia received support from major countries in the context of the Cold War. The resistance of the Timor Leste people lasted for two decades until Timor Leste finally achieved independence on May 20 2002, after a referendum held in 1999. This article also cites various sources from books and academic journals to describe the social, political and humanitarian impacts resulting from this invasion.

Keywords: Indonesian Invasion, East Timor, FRETILIN, Operation Seroja, Annexation, Human Rights, Referendum, Timor Leste Independence, Santa Cruz Massacre, Indonesia-Timor Leste Conflict, International Relations, Cold War

PENDAHULUAN

Sejarah invasi Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 merupakan salah satu peristiwa paling penting dan kontroversial dalam sejarah politik Indonesia dan Timor Leste. Konflik ini bukan hanya melibatkan pertempuran militer, tetapi juga memiliki dimensi politik,

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email : ajasobri938@gmail.com¹, sitiimasnii@gmail.com², 05sitikhadjahh@gmail.com³,
diansartika7658@gmail.com⁴, asshifahidayah07@gmail.com⁵, flores_tanjung@yahoo.co.id⁶

sosial, dan kemanusiaan yang sangat mendalam, yang memberikan dampak jangka panjang bagi kedua negara dan masyarakat internasional. Invasi ini berakar dari berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, yang dimulai dengan proses dekolonisasi Portugal, ketegangan geopolitik global pada masa Perang Dingin, dan kekhawatiran Indonesia terhadap stabilitas nasional dan integritas teritorialnya.

Pada tahun 1974, Portugal, sebagai kekuatan kolonial di Timor Timur, memutuskan untuk melepaskan wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya dekolonisasi. Keputusan Portugal untuk menarik diri meninggalkan kekosongan politik yang mendalam di Timor Timur. Di tengah ketidakpastian politik tersebut, tiga kelompok politik utama muncul, masing-masing dengan pandangan yang berbeda mengenai masa depan wilayah ini: **FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente)**, yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975, **UDT (União Democrática Timorensa)**, yang awalnya mendukung Portugal tetapi kemudian beralih ke posisi pro-Indonesia, dan **APODETI (Associação Popular Democrática Timorensa)**, yang secara terang-terangan mendukung integrasi dengan Indonesia. Ketika FRETILIN mengumumkan kemerdekaannya, kelompok-kelompok pro-Indonesia, terutama APODETI, khawatir akan pengaruh komunis yang dapat berkembang di wilayah tersebut dan mencari dukungan dari Indonesia.

Bagi Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, kebangkitan kemerdekaan Timor Timur merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan integritas teritorialnya. Indonesia menganggap bahwa jika Timor Timur dibiarkan merdeka, maka hal itu dapat menginspirasi gerakan separatisme di wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua. Selain itu, Indonesia juga khawatir bahwa Timor Timur akan menjadi negara komunis, mengingat kedekatannya dengan Vietnam Utara yang pada waktu itu merupakan negara komunis, serta kemungkinan adanya dukungan dari negara-negara komunis lain seperti Tiongkok dan Uni Soviet. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia juga memiliki kekhawatiran besar tentang potensi penyebaran pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara.

Menyikapi situasi ini, Indonesia mengambil langkah tegas dengan meluncurkan **Operasi Seroja** pada 7 Desember 1975, yang menandai dimulainya invasi besar-besaran ke Timor Timur. Pasukan Indonesia mendarat di Dili, ibu kota Timor Timur, dan segera meluncurkan serangan terhadap posisi-posisi FRETILIN. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur, meskipun perlawanan sengit dari kelompok pro-kemerdekaan seperti **FALINTIL (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste)** terus berlangsung. Invasi ini berujung pada pengumuman Indonesia bahwa Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976.

Namun, invasi tersebut memicu kecaman internasional yang luas. Masyarakat internasional, termasuk negara-negara Barat, mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan Indonesia di Timor Timur. Pembantaian, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pengusiran massal menjadi bagian dari kenyataan yang dialami oleh rakyat Timor Timur selama masa pendudukan. Salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah pendudukan Indonesia di Timor Timur adalah **Pembantaian Santa Cruz** pada 12 November 1991, di mana pasukan Indonesia menembaki para demonstran yang melakukan upacara peringatan di pemakaman Santa Cruz, Dili. Tragedi ini menjadi simbol dari brutalitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan.

Selama lebih dari dua dekade, perlawanan terhadap Indonesia tetap berlangsung, meskipun pasukan Indonesia secara keseluruhan menguasai wilayah Timor Timur. Banyak rakyat Timor Timur yang melarikan diri ke luar negeri, terutama ke negara-negara seperti Australia, yang menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam memerintah wilayah yang secara politis tidak sepenuhnya diterima oleh rakyat Timor Timur. Pemerintahan Indonesia di Timor Timur berusaha untuk membangun infrastruktur dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan pembangunan, tetapi hal ini tidak berhasil mengurangi ketidakpuasan dan perlawanan yang meluas di kalangan penduduk setempat.

Situasi mulai berubah pada akhir 1990-an, ketika Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang meluas. Krisis moneter yang dimulai pada 1997 membawa dampak serius terhadap perekonomian Indonesia dan menambah ketegangan sosial di dalam negeri. Pada tahun

1998, Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, terpaksa mengundurkan diri akibat tekanan politik dan massa. Kejatuhan Soeharto membuka peluang bagi perubahan kebijakan Indonesia terhadap Timor Timur. Di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia akhirnya setuju untuk mengadakan referendum di Timor Timur yang memberikan pilihan bagi rakyat Timor Timur antara tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memilih kemerdekaan.

Referendum yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, menghasilkan hasil yang menggembirakan bagi gerakan kemerdekaan Timor Leste, dengan lebih dari 78% suara memilih kemerdekaan. Hasil referendum ini disertai dengan kekerasan besar-besaran dari milisi pro-Indonesia yang didukung oleh pasukan Indonesia, yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Timor Timur. Meskipun begitu, pasukan perdamaian internasional, yang dipimpin oleh PBB, berhasil menjaga stabilitas dan membantu proses transisi menuju kemerdekaan.

Pada akhirnya, Timor Leste resmi merdeka pada 20 Mei 2002, setelah hampir 25 tahun di bawah pendudukan Indonesia. Kemerdekaan Timor Leste menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa untuk meraih kebebasan dan mengatasi penindasan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai sejarah invasi Indonesia ke Timor Timur, yang meliputi latar belakang politik, perjalanan invasi, dampak sosial dan kemanusiaannya, serta bagaimana peristiwa ini membentuk hubungan antara Indonesia dan Timor Leste hingga saat ini. Dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, jurnal, dan laporan internasional, artikel ini berupaya memberikan gambaran mendalam mengenai peristiwa yang telah mengubah nasib Timor Leste dan memberikan pelajaran penting mengenai hak asasi manusia, politik internasional, dan konflik regional.

METODE

pendekatan analitis dan deskriptif yang digunakan untuk mengeksplorasi sejarah invasi Indonesia ke Timor Timur. Peneliti melakukan kajian terhadap berbagai sumber, termasuk buku, jurnal akademik, dan laporan internasional, untuk memahami latar belakang politik, sosial, dan kemanusiaan dari peristiwa tersebut. Melalui analisis terhadap dokumen-dokumen sejarah dan data yang relevan, penulis menggambarkan konteks geopolitik yang melatarbelakangi invasi, serta reaksi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyajikan data secara komprehensif, yang mencakup perspektif dari berbagai pihak, serta dampak jangka panjang dari invasi terhadap hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas konflik dan dinamika sosial yang muncul akibat invasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa invasi Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 membawa dampak signifikan baik secara politik maupun kemanusiaan. Meskipun Indonesia mengklaim bahwa invasi tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah penyebaran komunisme, kenyataannya adalah bahwa pendudukan tersebut menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Peristiwa pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 menjadi salah satu simbol brutalitas selama pendudukan. Selain itu, meskipun pemerintah Indonesia berupaya membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan, banyak penduduk Timor Timur merasa terasing dan terpinggirkan, terutama akibat kebijakan pemindahan penduduk dan marginalisasi masyarakat lokal.

Pembahasan selanjutnya menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara *de facto* menguasai Timor Timur selama hampir 25 tahun, ketidakpuasan masyarakat tetap membara dan berujung pada perlawanan yang terus menerus. Referendum yang

diadakan pada tahun 1999 menjadi titik balik dalam perjuangan rakyat Timor Leste, di mana lebih dari 78% suara memilih kemerdekaan, meskipun diwarnai dengan kekerasan oleh milisi pro-Indonesia. Hasil referendum ini menunjukkan bahwa keinginan rakyat Timor Leste untuk menentukan nasib mereka sendiri sangat kuat. Proses menuju kemerdekaan yang diakui secara internasional pada 20 Mei 2002 menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, serta memberikan pelajaran penting tentang hak penentuan nasib sendiri dalam konteks konflik global. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya menghormati hak kebebasan suatu bangsa dan mengatasi dampak dari intervensi eksternal yang merugikan.

SIMPULAN

Sejarah invasi Indonesia ke Timor Timur pada 7 Desember 1975 mencatatkan peristiwa penting yang mempengaruhi politik Asia Tenggara, hubungan internasional, dan dinamika sosial-ekonomi kedua negara tersebut. Invasi ini dimotivasi oleh kekhawatiran Indonesia terhadap potensi kemerdekaan Timor Timur yang dapat memicu gerakan separatis di wilayah lain di Indonesia, serta pengaruh komunis yang dapat berkembang di kawasan tersebut pada masa Perang Dingin. Keputusan Indonesia untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran, yang dikenal dengan Operasi Seroja, berujung pada aneksasi Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada 1976, meskipun dengan perlawanan sengit dari kelompok pro-kemerdekaan seperti FRETILIN dan FALINTIL.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (1975, July 21). Timor Portugis Akan Merdeka Tahun 1978. Antara.
- Makarin, Zacky Anwar. (2003). Hari-Hari Terakhir Timor-Timur: Sebuah Kesaksian. Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
- Neonbasu, P. Groger. (1997). Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor Timur. Jakarta: Yanense Mitra Sejati.
- Hudaya, F., Zed, M., & Hardi, E. (2019). TINJAUAN HISTORIOGRAFI TENTANG KEKERASAN DI TIMOR TIMUR (1976-1999) DALAM SASTRA INDONESIA: SAKSI MATA. *Gelanggang Sejarah*, 118–140.
- Indrawan, J. (2015). Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Lapian A. B dan JR. Chaniago. (1988). Timor-timur dalam Gerak Pembangunan. Departemen Pendidikan Kebudayaan: Direktorat Jenderal dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Invent Arisasi Dokumentasi Nasional.
- Lorraine Proyek dan Sejarah Ranga Boro. (2014). JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949. *Masalah Masalah Hukum*, 43(3), 380–387.
- Liani, H. N., Pajar, I. A. N., Syauqi, A. H., & Fauzan, R. (2024). KAJIAN SEJARAH KONTROVERSI INTEGRASI TIMOR TIMUR: APAKAH SUDAH SESUAI FAKTA ATAU HANYA REKAYASA BELAKA. *Dewaruci: Jurnal Studi dan Sejarah Pengajarannya*, 3(1), 1–10.
- Mahendra, M. A., Rusadi, E. Y., & Dzakiruddin, M. (2021). Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal (Vol. 4, Issue 1).
- Rizky Pratama, M., & Ciciria, D. (2022). INTEGRASI TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA (1976-1999). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4, 1.
- RustamanaMPd, A., Si, M., Ghelifira, A. S., Narendra, D., Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Ciwaru No, P., & Correspondence, B. (2022). PROSES INTEGRASI DAN TERLEPASNYA TIMOR TIMUR TERHADAP INDONESIA (Vol. 5624, Issue 4).
- Sholahudin Fajar, A. M. (2017). Tangan Tangan Barat di Timor Timur: Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat Dalam Masalah Timor Timur Dari Indonesia Tahun 1976-1999 (Doctoral dissertation Universitas Pendidikan Indonesia). (ADA!!!!)

- Wardhani, W. (2000). Identifikasi Permasalahan Dan Kendala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa Di (Unamet).
- Widodo, N. N. R. (2025). Perjalanan Timor Timur Menjadi Provinsi Indonesia (1975-1999). *King Jurnal Sejarah Indonesia*, 3(1).
- Yossa, E. Timor (2016). DIPLOMATIK Timur UPAYA MENTERI LUAR NEGERI ALI ALATAS DALAM MEMPERTAHANKAN TIMOR-TIMUR (1987-1999). Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta.